

ABSTRAK

IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 DALAM PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA

Muhamad Nur Ajie Arie Achnuphi (2210622077), Slamet Tri Wahyudi, Supardi

SEMA bukan berbentuk peraturan/ *regeling* yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dilaksanakan, SEMA hanya sekedar bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim dan konsep ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif didukung wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian dalam pembahasan ini yaitu akibat hukum putusan perkara pidana narkotika menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim adalah putusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan kesenjangan putusan hakim bagi perkara yang lain yang identik dengan fakta hukum serta konflik kepentingan antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan. Konsep ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I yaitu dengan melakukan Perubahan Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan perubahan pada UU Narkotika khususnya pada Pasal 112 agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukumnya.

Kata Kunci: SEMA, Sanksi Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF SUPREME COURT CIRCULAR LETTER NUMBER 3 YEAR 2015 IN SENTENCES IN NARCOTIC CASES

Muhamad Nur Ajie Arie Achnuphi (2210622077), Slamet Tri Wahyudi, Supardi

SEMA is not a binding regulation/regelung and has legal force that must be implemented, SEMA is merely guidance in the administration of justice, which is more administrative in nature. This study aims to determine the legal consequences of decisions on narcotics criminal cases that deviate from the provisions of the general minimum special criminal law based on sufficient consideration by the Panel of Judges and the ideal concept of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Supreme Court Chamber Plenary Meeting in 2015 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court in narcotics criminal cases class I. The type of research in this study is normative juridical supported by interviews with informants. The results of the study in this discussion are that the legal consequences of a narcotics criminal case decision deviating from the provisions of the special minimum general criminal law based on sufficient consideration by the Panel of Judges are decisions that are contrary to the principle of legality and cause disparities in judges' decisions for other cases that are identical to legal facts and conflicts of interest between the Public Prosecutor and the Panel of Judges in the trial. The ideal concept of the Circular of the Supreme Court Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2015 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court in class I narcotics criminal cases is by making Changes to the Formulation of the Criminal Chamber Law on Narcotics in SEMA Number 3 of 2015 and changes to the Narcotics Law, especially in Article 112, so as not to cause multiple interpretations in the application of the law.

Keywords: SEMA, Criminal Sanctions, Narcotics.